KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	:	**W.32.OT.02.02-0137**
TGL PEMBUATAN	:	**22 Januari 2024**
TANGGAL REVISI	:	**-**
TANGGAL EFEKTIF	:	**22 Januari 2024**
DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM** **NIP. 197102031991031001**
NAMA SOP	:	**PENGAJUAN USULAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN; 3. Memahami tugas dan fungsi aspek-aspek pengelolaan BMN; 4. Memahami Tata Cara penetapan status penggunaan BMN
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelaporan BMN; 2. SOP Penatausahaan BMN Tingkat Pusat.	1. Dokumen Usulan; 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer; 3. Form Checklist; 4. Jaringan Internet; 5. Alat Tulis Kantor; 6. Disposisi.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak menjadi penyumbang Opini BPK.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENGAJUAN USULAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	KEPALA BAGIAN UMUM	KASUBAG PENGELOLAAN KEU& BMN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	OUTPUT	
1	Kepala Kantor Wilayah menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun draft usulan penetapan status penggunaan BMN	Mulai					Usulan Penetapan Status Pengunan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Kepala Divisi Administrasi menugaskan Kepala Bagian Umum untuk mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Kepala Bagian Umum menugaskan Kasubag Keuangan dan BMN untuk mengkonsep usulan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik pengajuan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	
5	Pelaksana mengetik dan menyiapkan data pendukung usulan penetapan Status Penggunaan BMN kemudian menyerahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan dan BMN				T		Intruksi Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	15 Menit	Konsep data pendukung pengajuan penetapan status BMN	
6	Kasubag mengkoreksi penyusunan konsep/draft usulan yang dilampiri data pendukung Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum			T		Y	Draf dan data dukung usulan penetapan status BMN	30 Menit	Konsep data pendukung pengajuan penetapan status BMN	
7	Kepala Bagian Umum mengkoreksi konsep/draft usulan yang dilampiri data pendukung Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada Kepala Divisi Administrasi		T		Y		data dukung usulan penetapan status BMN	30 Menit	Data dukung pengajuan penetapan status BMN	
8	Kepala Divisi Administrasi mengkoreksi berkas pengajuan dan menyetujui pengajuan penetapan status BMN serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			Y			data dukung usulan penetapan status BMN	20 Menit	Berkas pengajuan penetapan status BMN	
9	Kepala Kantor Wilayah mengesahkan berkas pengajuan dan menandatangani berkas pengajuan penetapan status BMN.	Selesai					Berkas Pengajuan penetapan status BMN	15 Menit	Hasil Berkas pengajuan penetapan status BMN yang telah disetujui	